

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang dalam fungsinya untuk menyelesaikan transaksi dari berbagai aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau instansi didalam masyarakat. Instrumen dan sistem pembayaran yang digunakan unuk menyelesaikan transaksi perekonomian mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dan teknologi informasi pada awalnya, mekanisme pembayaran atau perdagangan dalam masyarakat lazim dilakukan secara barter, maka sebagai solusinya digunakan uang sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangan, uang tunai yang digunakan adalah berupa uang logam dan berupa uang kertas (*uang kartal*). (Iskandar, 2014, hlm. 525).

Perihal dalam Alquran dan Hadis dua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam *Q.S At-Taubah/9:34* disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“..Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka Beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat)

siksa yang pedih,..” (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 283)

Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1953 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.40). Bank Indonesia bertindak sebagai Bank Sentral menggantikan *De Javasche Bank*.

Bank Indonesia merupakan suatu Badan Hukum Negara. Berdasarkan rumusan tugas Bank Indonesia dalam pasal 7 Undang-Undang Tahun 1953, dimana Bank Indonesia telah memiliki fungsi tradisional suatu Bank Sentral yaitu fungsi yang terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan perbankan, dan mengatur lalu lintas pembayaran.

Lahirnya Bank Indonesia disambut secara antusias oleh tokoh-tokoh dan masyarakat luas sebagai era baru di bidang keuangan bahkan di nilai sebagai lambang kedaulatan di bidang ekonomi dan moneter. Dari pihak lain, Gubernur Bank Indonesia Sjafruddin Prawiranegara mengomentari adanya perbedaan yang mencolok pada aspek independensi antara Undang-Undang No.11 Tahun 1953 dengan *De Javasche Bank* adalah sebagai berikut:

1. Pemisah antara Pemerintah dan Bank Sentral dinilainya tidak jelas, sehingga untuk penerbitan Laporan Tahunan Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia terlebih dahulu berunding dengan Dewan Moneter, sedangkan Presiden *De Javasche Bank* tidak terkait keharusan seperti itu.
2. Untuk pemimpin tertinggi Bank Indonesia bukan lagi disebut Direksi melainkan diatas ditempatkan sebuah Dewan Moneter, terdiri atas tiga anggota yang mempunyai hak suara yaitu Menteri Keuangan, Menteri

Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

3. Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No.15 Banjarmasin, Kantor Wilayah II Bank Indonesia Banjarmasin dibuka pada tanggal 01 Agustus 1907 dan ditutup karena suatu hal. Kemudian dibuka kembali pada tanggal 25 April 1946 dan berjalan sampai tanggal 07 Januari 2015, karena Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan secara mandiri sejak saat itu.

Penggunaan uang kartal oleh masyarakat secara umum lebih banyak digunakan untuk keperluan bertransaksi dengan nominal kecil (retail). Namun demikian, penggunaan uang kartal disamping memiliki kemudahan juga memiliki kendala dalam hal efisiensi dan biaya pengelolaan yang relatif mahal. Meskipun uang tunai masih sangat diminati oleh masyarakat, pada dasarnya memiliki beberapa resiko maupun kelemahan yaitu sifat fisiknya yang tidak mudah dibawa, membutuhkan biaya yang relatif tinggi untuk memindahkan. Menyimpan dan menghitungnya. Memiliki resiko keamanan dari kehilangan, pencurian atau perampokan, serta resiko uang palsu. Oleh karena itu, bank-bank sentral di dunia saat ini mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai, selain karena relatif lebih aman juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pembayaran karena transaksi bersifat lebih murah, cepat dan mudah sehingga lebih dapat meningkatkan produktifitas perekonomian negara. Penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Pencanaan tersebut

dimaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah aman dan efisien. Keberhasilan penerapan instrumen pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tidak terlepas dari standar ruang lingkup pekerjaan audit yang memberikan pedoman kepada auditor internal untuk melakukan audit keuangan, ketaatan, atau audit oprasional. Standar tertentu berkaitan dengan reliabilitas dan integritas informasi. (Tunggal, 2016, hlm. 18) Sehingga dalam melakukan transaksi pembayaran yang secara cepa, aman dan efisien akan mampu menunjang perkembangan sistem keuangan suatu perbankan. Sistem pembayaran yang cepat, aman dan efisien merupakan persyaratan bagi terciptanya stabilitas moneter dan keuangan. Dengan terciptanya stabilitas moneter dan keuangan tersebut maka tujuan utama bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uangnya menjadi lebih mudah untuk dicapai.

A new banking System is coming into reality, which uses an electronic money being an "electronic data' having the Same value as cash. Transferring electric money is carried out in the electronic money System, in which an electronic money information is Stored in an exclusive IC card and the electronic money information is Sent and received between two IC cards through exclusive equipment and terminals. (Masaaki, 23 jan 1997)

Maksud kalimat di atas, sistem perbankan baru menjadi kenyataan, yang menggunakan uang elektronik menjadi data elektronik yang memiliki nilai yang sama dengan uang tunai. Mentransfer uang listrik dilakukan keluar dalam Sistem

uang elektronik, di mana elektronik informasi uang disimpan dalam kartu IC eksklusif dan informasi uang elektronik Dikirim dan diterima antara dua kartu IC melalui peralatan dan terminal eksklusif.

Dalam praktiknya, penerapan instrumen pembayaran nontunai yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga harus diawali dengan melakukan riset, mendesain, menciptakan, dan mengomunikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian penerapan instrumen tersebut menjadi suatu pengetahuan yang baru yang akan dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah maupun lembaga keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat (Zainal, 2017, hlm. 18). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terselenggaranya sistem pembayaran sistem pembayaran perlu selalu dikembangkan, diatur dan diaasi oleh otoritas terkait yang umumnya merupakan bank sentral dan dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Tetapi, penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai. (Iskandar, 2014, hlm. 526).

Peningkatan teknologi dan infrastruktur pembayaran telah menciptakan tantangan bagi pengembangan sistem pembayaran. Ragam inovasi muncul baik

dalam bentuk instrumen pembayaran, metode, maupun mekanisme pembayaran. Tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana menyesuaikan dasar hukum maupun aturan main yang sesuai dengan garis kebijakan dibidang sistem pembayaran. Tantangan lain adalah bagaimana mengarahkan pengembangan sistem pembayaran tersebut agar sesuai dengan kebijakan dibidang sistem pembayaran yang akan meningkatkan efisiensi secara nasional (Pohon , 2011, hlm 126). Didalam dalam sektor keuangan dan perbankan peranan dari perkembangan teknologi telah mampu meningkatkan kondisi perekonomian yang saat ini berkembang pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai macam instrumen pembayaran yang muncul terutama pembayaran secara non tunai. Pada penelitian ini, salah satu penerapan instrumen pembayaran non tunai dikota Banjarmasin adalah pembayaran dengan menggunakan uang elektronik di beberapa minimarket, sedekah di mesjid,UMKM, E-kelotok dan (Bansos). Kondisi seperti ini sangat memudahkan penyelenggara ataupun pengguna untuk melakukan transaksi ekonominya. Selain adanya kemudahan bertransaksi secara non tunai QR Code ada beberapa kondisi yang masih belum bisa diterima oleh masyarakat luas terkait dengan instrumen pembayaran non tunai QR.

Non-cash media card which includes a credit card size Separable portion and information and Storage media with information encoded on the information Storage media which the user utilizes for Subsequent transactions, in) which said non-cash media card is configured for Storage in a currency dispensing tray of an automated teller machine, and dispensation by Said automated teller machine, and which has the same dimensional tolerances as the currency dispensed by the

automated teller machine, and which has value to the user and is used by the user in exchange for goods and Services. (Behrmann, 15 Juli 1997)

Maksud dari kalimat di atas, kartu media non tunai yang mencakup ukuran kartu kredit Porsi dan informasi terpisah dan media penyimpanan dengan informasi yang dikodekan pada Penyimpanan informasi media yang digunakan pengguna untuk Selanjutnya transaksi, di yang mengatakan kartu media non-tunai dikonfigurasi untuk Penyimpanan dalam baki pengeluaran mata uang mesin teller otomatis, dan dispensasi oleh Said Anjungan Tunai Mandiri, dan yang memiliki kesamaan toleransi dimensional sebagai mata uang yang dibagikan mesin teller otomatis, dan yang memiliki nilai untuk pengguna dan digunakan oleh pengguna dengan imbalan barang dan layanan.

Dalam penerapan QR Code masih ada kendala dan memerlukan waktu yang lama terutama di kota-kota kecil. Dikarenakan mengingat tingkat literasi keuangan digital di Indonesia yang masih sangat rendah dan juga banyaknya masyarakat yang belum tau cara penggunaan transaksi QR Code karena belum sampainya informasi ke semua desa-desa, ditambah masih banyaknya masyarakat yang sudah lanjut usia tidak dapat menggunakan transaksi QR Card ini dikarenakan ketidak tahuan di teknologi sekarang Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan edukasi keseluruhan masyarakat, dan juga masih terkendalanya konektivitas yang belum merata.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang mudah, aman, dan efisien, Bank Indonesia harus terus menerus melakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard*

agar bisa terbilang efektif. Pengembangan dan penyempurnaan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan, pengembangan mekanisme dan infrastruktur serta ketentuan yang diarahkan untuk mengurangi resiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran non tunai. Dengan adanya peran bank indonesia dalam bidang sistem pembayaran akan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu peran Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, katalisator pengembangan sistem pembayaran di indonesia. Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan efektivitas kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan Sistem Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)?
2. Apa saja kendala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia dalam meningkatkan sistem transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
2. Untuk mengetahui kendala Bank Indonesia dalam meningkatkan sistem transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Diharapkan mampu menabuh khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam khususnya yang terkait dengan kebijakan Bank Indonesia dalam meningkatkan meningkatkan sistem *transaksi Quick Response Code Indonesian Standard*(QRIS)
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari ospek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Seberapa Efektivitas Bank Indonesia KPW Provinsi Kalsel, ialah cara-cara atau teknik-teknik tertentu yang digunakan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, untuk membuat masyarakat bisa lebih mengenal dan menggunakan transaksi melalui QRIS
2. Dalam meningkatkan penggunaan sistem transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* masyarakat menggunakan transaksi melalui non tunai yang berbentuk kode batang dan menggunakan *Hendphone* yang sudah terkoneksi dengan jaringan untuk sebagai pembayaran yang telah dilakukanya (Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, 2019)

F. Kajian Pustaka

Skripsi yang diangkat ini pada dasarnya adalah penelitian empiris, yaitu berupa penelitian lapangan yang pencarian atau penggalian datanya dengan langsung terjun ke lapangan mengenai Efektivitas dari Bank Indonesia Kpw Kalsel dalam meningkatkan sistem transaksi pembayaran QR Code di kalangan masyarakat.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan tentang skripsi yang telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khusus tentang perbankan syariah

yang terkait dengan persoalan QRIS ternyata tidak ada kesamaan dengan skripsi yang penulis angkat ini, seperti:

1. Ida yuliani, NIM 1201160238, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, jurusan Perbankan Syariah, maju tahun 2016, berjudul: Strategi Sosialisasi *Electronic Money* oleh Bank Indonesia kepada Masyarakat di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketidaktahuan masyarakat di Kalimantan Selatan dalam menggunakan *electronic money* sebagai alat transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penulis menilai perlunya melakukan sebuah penelitian tentang langkah-langkah Bank Indonesia dalam mensosialisasikan electronic money kepada masyarakat. Ada pun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang efektivitas Bank Indonesia dalam meningkatkan tranaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dengan melakukan transaksi menggunakan code QR tetapi sama-sama menggunakan non tunai.
2. Rabiatul Adawiyah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah, maju tahun 2015, berjudul: pengaruh penggunaan *Electronic Money* terhadap volume transaksi di koperasi IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini dilatar belakang dengan diberlakukanya sistem pembayaran menggunakan *electorinic money* (uang elektronik yang mana nilai uang tersimpan dalam kartu) yang ada di IAIN yaitu Brizzi (dari Bank BRI), Flazz (dari Bank BCA) dan E-Toll (dari Bank Mandiri) sudah

dijalankan oleh beberapa koperasi pegawai negeri di IAIN Antasari Banjarmasin yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Pegawai Negeri Tarbiyah, Koperasi Syariah Dakwah, dan koperasi mahasiswa (kopma). Diharapkan dengan diberlakukannya sistem pembayaran menggunakan electronic money ini memudahkan bagi mahasiswa dan memberikan dampak yang positif terhadap setiap kegiatan pembayaran yang dilakukan. Adapun perbedaannya ialah penulis melakukan penelitian tentang efektivitas Bank Indonesia dalam meningkatkan transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dengan melakukan transaksi menggunakan code QR.

3. Kartina sari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah, maju tahun 2015, berjudul: Minat mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin terhadap penggunaan alat pembayaran nontunai *Electronic Money (E-Money)*. *Electronic money* merupakan salah satu alat pembayaran *electronic* atau non tunai yang dengan menggunakan kartu uang *electronic*. Nilai uang disimpan secara *electronic* yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor pemegang kepada penerbit. Nilai uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran namun bukan merupakan simpanan. *Electronic money* ini juga merupakan sebuah produk baru dan hal baru yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia. Adapun perbedaannya penulis melakukan penelitian tentang efektivitas Bank Indonesia dalam

meningkatkan transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I : Merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang dan permasalahan mendasar penelitian ini terkait kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia Kpw kalsel untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi menggunakan QR Code. Pendahuluan ini terdiri atas, latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran sebagai regulator, fasilitator, katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia, jadi Bank Indonesia mengeluarkan sistem transaksi pembayaran berupa QR Card untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Kemudian dirumuskanlah masalah dan ditetapkan tujuan penelitian. Lalu disusunlah signifikansi penelitian ini, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan landasan teoritis sebagai landasanteori penelitian ini dan untuk bahan analisis data, yang membahas mengenai efektivitas

kebijakan Bank Indonesia, terdiri dari: pengertian efektivitas kebijakan, asas-asas kebijakan Bank Indonesia, , dan tugas bank indonesia sebagai bank sentral yang mengatur sistem kelancaram pembayaran.

Bab III : Merupakan metode penelitian, sebagai cara-cara yang penulis gunakan untuk menggali dan menghimpun data yang diteliti di lapangan. Terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan di Bank Indonesia Kpw kalsel terkait upaya, efektivitas kebijakan dalam melakukan sistem transaksi QRIS dan kemudian penelitian ini dikaji secara mendalam melalui analisis.

Bab IV : Penyajian data tentang efektivitas yang dilakukan dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS, dan kendala dalam penerapan efektivitas yang dilakukan dalam kebijakan dalam transaksi QRIS. Analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun tentang sejauh mana penerapan efektivitas kebijakan Bank Indonesia Kpw kalsel dalam meningkatkan sistem transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Bab V : Merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian ini, terdiri dari kesimpulan yang merupakan ringkasan dari penelitian ini dan saran-saran terkait hasil penelitian.